

**JURNAL ILMIAH
LEX PUBLICA**

ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA

DAFTAR ISI

Vol. VI. No. 1, Juni 2019

PENGANTAR REDAKSI

Pembaruan Sistem Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Modern

Oleh: Muhammad Syarifuddin..... hal. 1-9

Aligning Governance in Structuring Policies for the Development of Pancasila ideology and National Resilience

Oleh: Lutfi Trisandi Rizki, Ma'ruf Cahyono, dan Bambang Soesatyo..... hal. 10-17

The Accommodation of Social and Cultural Forces in the Decision-making Process by Judges In Indonesia

Oleh: Ade Saptomo..... hal. 18-24

Reformasi Hukum dalam Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Nasional

Oleh: Lucky Ferdiles..... hal. 25-31

Jaminan Hukum atas Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat

Oleh: Gamal Abdul Nasir, Khudzaifah Dimiyati, dan Absori Absori..... hal. 32-40

Proses dan Bentuk Penataan Ruang Masyarakat Hukum Adat Arfak Papua Barat dalam Perspektif Penataan Ruang Nasional

Oleh: Roberth Kurniawan Ruslak Hammar..... hal. 41-51

Authority of the Constitutional Court in the Dispute Resolution of Regional Head Elections

Oleh: Anis Mashdurohatun, Erman Suparman, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani..... hal. 52-60

Pengantar Redaksi.....

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang karena rahmatnya dan karunianya kita tetap dapat berkontribusi melalui karya-karya akademis yang harapannya dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam edisi kali ini, Lex Publica menerbitkan enam artikel yang darapannya akan dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi masyarakat khususnya dalam bidang penegakan hukum.

Bangsa Indonesia telah melewati momen pesta demokrasi untuk memilih Presiden. Pemilihan Presiden (pilppres) merupakan momen yang besar bagi bangsa dan negara dimana dalam setiap prosesnya, terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang memerlukan penyelesaian. Melalui penerbitan edisi kali ini, Lex Publica mencoba memaparkan beberapa permasalahan tersebut melalui enam artikel yang termuat.

Melalui proses penyortiran yang ketat, manuscript dalam setiap terbitan Lex Publica diharapkan mampu merangsang pembaca untuk menemukan solusi atas setiap permasalahan hukum dan kebijakan yang dihadapi masyarakat secara adil. Artikel pertama dalam terbitan ini berjudul *“Penal System Update in Modern Judicial Practice”* mengambil tema mengenai peradilan sederhana yang cepat dan dengan biaya ringan. Hal ini diharapkan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan pencari keadilan dengan ekonomi lemah.

Artikel kedua berjudul *“Aligning Governance in Structuring Policies for the Development of Pancasila ideology and National Resilience”* dari Lutfi Trisandi Rizki, Ma’ruf Cahyono dan Bambang Soesatyo. Manuscript kedua ini mengambil tema tentang pengaruh pembinaan ideologi Pancasila masa orde baru terhadap lahirnya sistem pemerintahan yang sentralistis. Penataan ulang terhadap Pembinaan Ideologi Pancasila perlu dilakukan dengan tujuan membuat Pancasila benar-benar relevan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada urutan ketiga, artikel berjudul *“The Accommodation of Social and Cultural Forces in the Decision-making Process by Judges In Indonesia”* oleh Ade Saptomo. Artikel ini mengambil tema mengenai akomodasi kekuatan sosial dan budaya dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Terdapat respon yang berkembang di tengah masyarakat dimana putusan hakim di Indonesia tidak mencerminkan keadilan.

Urutan keempat diisi oleh artikel berjudul *“Legal Reform in the Implementation of Restorative Justice in the National Criminal System”*. Studi ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi restorative justice dalam Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (RUU KUHP), dan membedah dasar hukum bagi konsep restorative justice sebagai landasan bagi para penegak hukum untuk bisa dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Selanjutnya pada urutan kelima, terdapat artikel dengan judul *“Legal Guarantee for the Recognition and Existence of Ulayat Rights in Indigenous Law Communities”*. Artikel ini membahas tentang bagaimana masyarakat hukum adat harus diakui hak-haknya. Hal ini mengacu pada Pasal 56 tentang Undang-Undang pokok Agraria (UUPA).

Pada urutan keenam, terdapat artikel yang ditulis oleh Roberth Kurniawan Ruslak Hama dengan judul *“The Process and Form of Spatial Planning for the Arfak Indigenous Peoples of West Papua in the Perspective of National Spatial Planning”*. Kearifan lokal penataan ruang MHA perlu digali melalui penelitian dan pengkajian yang mendalam dalam rangka penataan ruang nasional dan daerah, guna sinergitas dan meminimalisasi perebutan ruang yang seringkali terjadi akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak populis dan demokratis.

Artikel terakhir berjudul *“Authority of the Constitutional Court in the Dispute Resolution of Regional Head Elections”* yang ditulis oleh Anis Mashdurohatun, Erman Suparman, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. Artikel ini membahas peranan mahkamah konstitusi dalam memutus sengketa pilkada. Dalam proses menjaga kemurnian suara pemilu agar tercapainya kedaulatan rakyat, tugas ini tidak boleh hanya disandarkan pada satu Lembaga saja, akan tetapi diperlukan sinergi dari seluruh organ negara guna mensukseskan pilkada.

Tidak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada penulis, editor, serta jajaran pengurus yang telah berkontribusi merealisasikan penerbitan volume jurnal ini. Akhir kata, semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk tetap konsisten dalam menerbitkan karya-karya ilmiah yang harapannya dapat berdampak positif terhadap perkembangan peradaban.

Salam Membaca dan Salam Redaksi